



Komisi V DPR RI: Ungkap Semua Pelaku

**Kementerian PDTT
Jebol Bank Daerah**

PONTIANAK—Komisi V Kementerian Pembangunan DPR RI berang dan marah Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) di Kalimantan

Barat merugikarbank daerah hingga mencapai Rp8,8 miliar. Evaluasi dan pengawasan segera dilakukan guna menelusuri sejauh mana provinsi atau kabupaten lain juga ikut menjadi korban dari program

ini. Mereka pun meminta aparat penegak hukum menangkap kasus ini dan menangkap semua pelakunya. "Sangat tidak masuk akal saja kedengarannya. Ada program proyek tertera di

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PDTT 2018 tetapi sukses mengkadali dana Bank Daerah hingga Rp8,8 miliar

◆ Ke Halaman 15 kolom 1



Komisi V DPR RI: Ungkap Semua Pelaku

Sambungan dari halaman 9

dengan cara mengajukan Kredit Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) fiktif," ungkap Syarif Abdullah Alkadrie, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Jumat(22/11) di Pontianak.

Menurutnya kalau sudah terjadi hal demikian, tingkat permainannya sangat tinggi sekali. Harus diselidiki bagaimana anggaran miliar rupiah pada Bank Daerah bisa jebol. "Tak hanya PPK, pihak pelaksana, konsultan dan pihak bank juga harus ditelusuri. Buka sejelas-jelasnya bagaimana bisa jebol itu barang. Ini akan menjadi evaluasi kami dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PDTT," ucapnya.

Politisi NasDem Kalbar ini menambahkan kebiasaan anggaran andai sudah masuk program nasional pasti akan masuk di nomenklatur APBN RI. Ada dua komposisi anggarannya. Apakah berada di anggaran KL, Badan atau melalui dana transfer daerah atau DAK (Dana Alokasi Khusus). Semua sifat dana tersebut tercatat jelas di APBN RI. "Jadi tidak bisa main-main," ucapnya.

Pertanyaannya kenapa bisa fiktif? Syarif menduga ada administrasi terlalu dimudahkan hingga pengawasan sampai ke mata anggaran Kementerian PDTT tidak terbuka. Harusnya bank daerah punya syarat ketika akan meminjamkan kepada

seseorang. Selanjutnya benar atau tidak, oknum pejabat di PDTT melakukan pemalsuan. Andai ada tanda tangan dan diduga permainan, harusnya pengguna anggaran terlibat dan paham. Namanya fiktif, korupsi dan manipulatif berbeda-beda. Fiktif adalah tidak ada tetapi dibuat ada, dengan berbagai keahlian administrasi dan teknis. Sementara korupsi ditemukan kerugian negara melalui audit lembaga berwenang semacam BPK RI.

Ketua DPP NasDem RI dapil Kalimantan ini lantas menyerahkan semuanya kepada proses hukum berlaku. Seandainya PPK ditahan, tinggal ditelusuri apakah ada indikasi kerja bersama-sama atau hanya

diri sendiri. "Ini kan masih berproses. Bagi saya mari ikuti hukum dan terpenting ditegakkan sebenarnya. Siapa korban dan siapa pelaku," tukas dia. Kepada Bank Daerah juga wajib dievaluasi jajaran yang terlibat dalam proses pencairan KPBJ ini. Seandainya dalam perbankan sendiri ada oknum bermain, proses juga dengan aturan berlaku. Yang jelas kesalahannya adalah sudah lalai dalam memproses pengajuan kredit proyek fiktif untuk pelaksana. "Setahu saya runtutannya berupa kontrak kerja jelas. Tempat proyek ada, data-data pendukung semacam perusahaannya, SPK dan DIPA ditelusuri dong hingga ke pusat (Kementerian PDTT)," tukasnya. **(den)**